



**RENCANA
AKSI
(RENAKSI)
T.A. 2023**

**DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

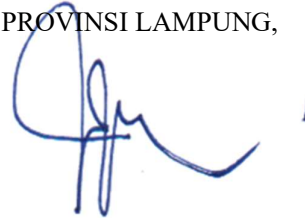
Rencana Aksi merupakan dokumen perencanaan dalam mempersiapkan penyelenggaraan program kerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refirmasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Rencana Aksi menyajikan indikator dan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perubahan RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Renaksi Tahun 2022 ini juga merupakan salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menuju terwujudnya *good governance*.

Demikian Renaksi 2023 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI LAMPUNG,



Ir. Y, RUCHYANSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680508 200003 1 006

I. PENDAHULUAN

1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kedudukan Dinas Kehutanan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung di bidang Kehutanan. Dinas Kehutanan bertugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi, dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491) dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/6/B.07/HK/2023 tentang Penetapan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

Tugas pokok Dinas Kehutanan adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:

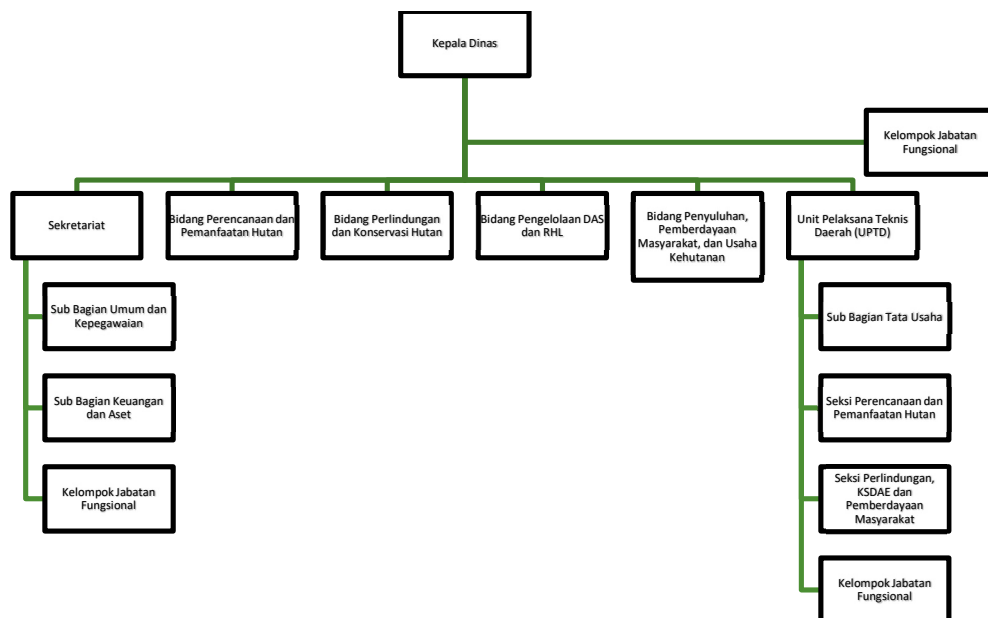
- a. pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga kantor serta penyusunan data, perencanaan program dan anggaran, monitoring dan pelaporan;
- b. penyelenggaraan kegiatan perencanaan pengelolaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- c. penyelenggaraan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi hutan di Provinsi Lampung;
- d. penyelenggaraan pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan serta perbenihan tanaman hutan;
- e. penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan usaha kehutanan;

- f. penyelenggaraan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHP, KPHL, dan TAHURA;
- g. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi di bidang kehutanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas:
- b. Sekretariat; yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan;
- e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);
- f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Usaha Kehutanan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan Kelompok Jabatan Fungsional.



UPTD pada Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Kelas A;
- b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesisir Barat Kelas A;
- c. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa Kelas A;
- d. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur Kelas A;
- e. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Muara Dua Kelas A;
- f. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sungai Buaya Kelas A;
- g. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Terusan Kelas A;
- h. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Waya Kelas A;
- i. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tangkit Tebak Kelas A;
- j. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Tegi Kelas A;
- k. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Agung Utara Kelas A;
- l. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pematang Neba Kelas A;
- m. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesawaran Kelas A;
- n. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gunung Balak Kelas A;
- o. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Serampok Kelas A;
- p. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Pisang Kelas A; dan
- q. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani Kelas A.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Aksi

Penyusunan Rencana Aksi Kehutanan Provinsi Lampung bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan program kerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2022;
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja program dalam rangka mendukung capaian target kinerja tahunan;
3. Untuk mengetahui bahwa pencapaian Indikator Sasaran, Program, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Dinas Kehutanan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas serta sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung.

II. RENCANA AKSI

2.1. Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor SK.13/V.24/S.1/2022, tanggal 20 Januari 2023, tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 terdapat 2 (dua) indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sebagaimana tabel berikut:

NO	IKU DINAS KEHUTANAN								
	SASARAN STRATE GIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	31,31	33,93	32,69	33,19	33,69	34,19
2	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor kehutanan	Persentase penurunan tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor kehutanan	Persen	0,83	0,42	0,05	0,05	0,05	0,05

Untuk mencapai indikator sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan, Dinas Kehutanan menetapkan 5 (lima) rencana program, dengan total pagu sebesar Rp 72.316.687.552, yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan :

a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d) Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan / Material
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Pengelolaan Hutan

Terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan

- b) Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan

- c) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
2. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung

- d) Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara;

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
2. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
3. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan

- e) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
2. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
3. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

- f) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
2. Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu

g) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun;
Terdiri atas sub kegiatan:

1. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
2. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

h) Perbenihan Tanaman Hutan

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
2. Sertifikasi Sumber Benih

3) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Kegiatan :

a) Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
2. Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
3. Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
4. Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
6. Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi
7. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
8. Perencanaan Pengelolaan TAHURA

b) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) untuk Kewenangan Daerah Provinsi

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES

c) Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

4) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Kegiatan:

a) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial

5) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kegiatan:

a) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Terdiri atas sub kegiatan:

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
3. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS

2.2. Matriks Rencana Aksi Tahun 2023

Rencana Aksi 2023 disusun per triwulan, sesuai dengan matriks di bawah ini :

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023
TRIWULAN I

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN I
															19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)	1	-	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan	Persentase dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan	1	0	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Meningkatnya dokumen penataan hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH		100%			
			2	-				2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Tertindakannya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk	1	-	Dokumen	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi
			3	-				3	0				2	-	Dokumen		
			4	33,69				4	100%				3	-	Dokumen		
													4	1,00	Dokumen		
										Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Meningkatnya dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan	Persentase dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan		100%			
										Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	-	Dokumen	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Penyusunan Dokumen RPHJ Pendek 16 KPH Tahun 2024
													2	-	Dokumen		
													3	-	Dokumen		
													4	16	Dokumen		
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya luas pemanfaatan hutan	Persentase luas Pemanfaatan Hutan	1	0	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Meningkatnya luas area pemanfaatan hutan	Persentase peningkatan luas area pemanfaatan hutan		5%			
								2	0	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	-	Dokumen	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	1. Penyusunan Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi 2. Pelaksanaan Festival wisata Hutan
								3	0				2	-	Dokumen		
								4	5%				3	0,50	Dokumen		
													4	0,50	Dokumen		
										Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi	1	-	Dokumen	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Penyusunan Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung
													2	0,50	Dokumen		
													3	0,25	Dokumen		
													4	0,25	Dokumen		
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi	Lahan Kririts yang di rehabilitasi	1	0	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis yang direhabilitasi		962,77	ha		
								2	0	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1,00	Dokumen	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Tahun 2023
								3	0				2	0,00	Dokumen		
								4	963 ha				3	0,00	Dokumen		
													4	0,00	Dokumen		
										Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Tertindakannya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1	962,77	Ha	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	Penhijauan lingkungan di KPH
													2	-	Ha		
													3	-	Ha		
													4	-	Ha		
										Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Tertindakannya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1	0,25	laporan	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	1. Monev Kegiatan RHL di Kab Tanqam 2. Monev Kegiatan RHL di Kab Pesisir Barat 3. Monev Kegiatan RHL di Kab Lampung Barat 4. Monev Kegiatan RHL di Kab Way Kanan
													2	0,25	laporan		
													3	-	laporan		
													4	0,5	laporan		

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN I	
															19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18				
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Menurunnya kerusakan hutan	Luas kerusakan hutan	1	0	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Meningkatnya pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Persentase kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan		100%				
								2	0	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Hutan	Jumlah penanganan tindak pidana kehutanan di Provinsi Lampung	1	Kasus	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	1. Patroli Pengamanan Hutan 2. Penyidikan TIPIHUT	√	
						3	0	2	-				Kasus					
						4	374.965 ha	3	-				Kasus					
								4	1				Kasus					
										Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah operasi/patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1	51	Operasi	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan di 17 KPH berbasis SIPONTAN	√
								2	51				Operasi					
								3	51				Operasi					
								4	51				Operasi					
										Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Terlaksananya Pengamanan Hasil Hutan	Jumlah operasi/patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	1	-	operasi	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan di kawasan sekitar Pelabuhan Bakauheni	√
								2	-				operasi					
								3	3				operasi					
								4	2				operasi					
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1	1	laporan	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan ke 17 KPH 2. Koordinasi Pelaksanaan Perlindungan Hutan ke ke KemenLHK	√
								2	-				laporan					
								3	-				laporan					
								4	1				laporan					
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1	-	laporan	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	1. Identifikasi/pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2. Ground check kebakaran hutan dan lahan	√
								2	-				laporan					
								3	-				laporan					
								4	1,00				laporan					
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya produksi Hasil Hutan	Produksi Hasil Hutan	1	0	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Meningkatnya produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Persentase kenaikan produksi Hasil Hutan bukan Kayu		1,2%				
								2	0	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku dan Akses Pasar bagi PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1	-	unit manajemen	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Rekonsiliasi PNPB PSDH-DR sektor	√
						3	0	2	-				unit manajemen					
						4	1,2%	3	-				unit manajemen					
								4	2				unit manajemen					
										Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Terpenuhinya Hak Akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1	-	unit manajemen	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Pembinaan kepada pelaku usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu	√
								2	-				unit manajemen					
								3	-				unit manajemen					
								4	2				unit manajemen					
										Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan kayu	Persentase meningkatnya produksi hasil hutan kayu		5%				
										Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1	-	Dokumen	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Pembinaan IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun ke Kabupten Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pringsewu, Pesisir Barat, dan Lampung Timur	√
								2	-				Dokumen					
								3	1				Dokumen					
								4	1				Dokumen					

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI			JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW		PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN I
														17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	
										Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu Skala dan Menengah Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1	2	Dokumen	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Fasilitasi kepengurusan IUIPHHK Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	√
												2	3	Dokumen				
												3	3	Dokumen				
												4	3	Dokumen				
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan	Persentase pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan	1	0	Perbenihan Tanaman Hutan	Meningkatnya jumlah Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan	Jumlah Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan		100%				
								2	0	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1	0	unit usaha	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	Survey/verifikasi ke Pengada dan Pengedar benih dan/atau bibit Tanaman Hutan Terdaftar	
							3	0				2	1	unit usaha				
							4	100%				3	2	unit usaha				
												4	2	unit usaha				
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	1	-	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	Persentase Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan		5%				
								2	-	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1	50,00	orang	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan	1. Pelaksanaan Penilaian Lomba Wana Lestari, Pembinaan Penyuluh Kehutanan, PKSM, dan Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan	√
							3	-				2	50,00	orang				
							4	5%				3	50,00	orang				
												4	50,00	orang				
										Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1	-	kelompok	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan	1. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	√
												2	-	kelompok				
												3	-	kelompok				
												4	11	kelompok				
										Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1	-	ha	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	1. Pelaksanaan Bintekwasdal Izin Perhutanan sosial di KPH	√
												2	-	ha				
												3	-	ha				
												4	63.197	ha	2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pra dan paska izin Ps di KPH			

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI			JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN I	
																		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	
					PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Meningkatnya pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Persentase rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 provinsi	1	-	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kab/kota dalam daerah kab/kota dalam 1 daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Provinsi		25%				
								2	-	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Tersusunnya dan Ditetapkannya Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1	-	Dokumen	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	1. Pengumpulan data biofisik, sosekbud, dan kelembagaan DAS Sekampung 2. Re-checking lapangan dalam rangka penyusunan RPDAS	√
							3	-				2	-	Dokumen				
							4	25%				3	-	Dokumen				
												4	1	Dokumen				
										Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1	-	Orang	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	1. Pembinaan terhadap KTH/Kopmas terkait Pengelolaan DAS Terpadu	√
												2	30	Orang				
												3	-	Orang				
												4	-	Orang				
										Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1	-	Dokumen	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	1. Pelaksanaan Koordinasi dan Monev Penggelolaan DAS Terpadu	√
												2	-	Dokumen				
												3	-	Dokumen				
												4	1	Dokumen				
2	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	1	-	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Meningkatnya luas areal yang telah dipulihkan	Luas areal yang telah dipulihkan	1	-	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Meningkatnya Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi		35 ha				
			2	-				2	-	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	1	-	Laporan	KPHK TAHURA WAR	Operasi Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	
			3	-				3	-			2	-	Laporan				
			4	0,05%				4	35 ha			3	3	Laporan				
												4	3	Laporan				
										Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	1	-	Operasi	KPHK TAHURA WAR	Operasi Pengamanan Kawasan Tahura pada setiap Resort	
												2	6	Operasi				
												3	-	Operasi				
												4	-	Operasi				
										Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Jenis Tumbuhan, Satwa dan Habitatnya di Tahura Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	1	0,50	Ha	KPHK TAHURA WAR	1. Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat Penangkaran Rusa	√
												2	0,50	Ha				
												3	0,50	Ha				
												4	0,50	Ha				
										Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pemulihan Ekosistem Tahura Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	1	8,75	Ha	KPHK TAHURA WAR	1. Pembangunan/pemeliharaan Pusat Inkubasi Koleksi Tanaman Nusantara	√
												2	8,75	Ha				
												3	8,75	Ha				
												4	8,75	Ha				
										Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di Tahura	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindaklanjuti	1	-	Permohonan	KPHK TAHURA WAR	1. Fasilitas dan/atau Monitoring Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	
												2	1	Permohonan				
												3	1	Permohonan				
												4	1	Permohonan				
										KERJA SAMA PENYELenggaraan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara Tahura Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	1	-	Dokumen	KPHK TAHURA WAR	1. Fasilitas dan/atau Monitoring Evaluasi Kerjasama Penyelenggaraan TAHURA	
												2	2	Dokumen				
												3	3	Dokumen				
												4	-	Dokumen				

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI			JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN I	
																		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	
										Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	1 2 3 4	- - - 10 Desa	KPHK TAHURA WAR	1. Penguatan Kapaitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA	√	
										Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Tahura Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang	1 2 3 4	- - - 2 Dokumen	KPHK TAHURA WAR	1. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura Jangka Panjang dan Jangka Pendek	√	
					PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	meningkatnya perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar	Jumlah perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar	1	-	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar	persentase perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar		90%/ tahun				
								2	-	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 2 3 4	- 1 - - Laporan	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	1. Pembinaan tim satgas penanggulangan satwa liar 2. Identifikasi tegakan kayu sonokeling 3. Hibah perlengkapan tim satgas penanggulangan satwa liar		
								4	2 jenis									
										Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase kegiatan pengelolaanKawasan bernilai ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola		90%/ tahun				
										Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	1 2 3 4	Orang 30 Orang - Orang	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	25%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	(Jumlah rencana penyusunan dokumen perencanaan / realisasi penyusunan dokumen) X 100%		100%				
								2	25%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 2 3 4	6 6 6 6 Dokumen	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	√	
								3	25%									
								4	25%									
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 2 3 4	- - - 2 Dokumen	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja OPD		
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah		100%				

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	481 orang/bulan	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√
												2	481 orang/bulan				
												3	481 orang/bulan				
												4	481 orang/bulan				
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	1	- Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	√
												2	- Laporan				
												3	- Laporan				
												4	1,00 Laporan				
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	meningkatnya Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%			
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	- Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
												2	- Laporan				
												3	1,00 Laporan				
												4	- Laporan				
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		100%			
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	- Orang	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
												2	75 Orang				
												3	75 Orang				
												4	- Orang				
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah		12 bulan			
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4 paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kehutanan dan KPH	√
												2	4 paket				
												3	4 paket				
												4	6 paket				
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	4 paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Kehutanan dan KPH	√
												2	4 paket				
												3	4 paket				
												4	6 paket				
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	2 paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Kehutanan dan KPH	√
												2	3 paket				
												3	3 paket				
												4	4 paket				
										Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	4 paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Bahan/Material untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
												2	4 paket				
												3	4 paket				
												4	6 paket				
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	3 Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Fasilitasi Makan Minum Tamu/Rapat untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
												2	3 Laporan				
												3	3 Laporan				
												4	3 Laporan				
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	3 Laporan	SEKRETARIAT	1. Rakorenbanghut 2023 2. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
												2	3 Laporan				
												3	3 Laporan				
												4	3 Laporan				
										Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	3 Dokumen	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	√
												2	3 Dokumen				
												3	3 Dokumen				
												4	3 Dokumen				

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN I
															19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18			
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik OPD	Persentase jumlah pengadaan barang milik daerah		100%			
										Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 - paket 2 1 paket 3 - paket 4 - paket		SEKRETARIAT	1. Pengadaan Mebel untuk OPD	
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 3 Unit 2 - Unit 3 - Unit 4 - Unit		SEKRETARIAT	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk OPD	√
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 - Unit 2 1 Unit 3 - Unit 4 - Unit		SEKRETARIAT	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
											Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 - Unit 2 7 Unit 3 - Unit 4 - Unit		SEKRETARIAT	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan dinas kehutanan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dinas kehutanan		12 bulan			
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 3 Laporan 2 3 Laporan 3 3 Laporan 4 3 Laporan		SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 3 Laporan 2 3 Laporan 3 3 Laporan 4 3 Laporan		SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 3 Laporan 2 3 Laporan 3 3 Laporan 4 3 Laporan		SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penyediaan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik dinas kehutanan	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik dinas kehutanan		12 bulan			
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 51 unit 2 51 unit 3 51 unit 4 69 unit		SEKRETARIAT	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda Empat	√
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 27 unit 2 51 unit 3 51 unit 4 93 unit		SEKRETARIAT	1. Penyediaan Pajak Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda Empat	√
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 24 unit 2 31 unit 3 12 unit 4 89 unit		SEKRETARIAT	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan perlengkapan kantor untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 - unit 2 1 unit 3 - unit 4 - unit		SEKRETARIAT	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung untuk Dinas Kehutanan dan KPH	

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023
TRIWULAN II**

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN II
																	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)	1	-	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan	Persentase dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan	1	0	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Meningkatnya dokumen penataan hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH		100%			
			2	-				2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk	1 2 3 4	- - - 1,00 Dokumen	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	
			3	-				3	0								
			4	33,69				4	100%								
										Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Meningkatnya dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan	Persentase dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan		100%			
										Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 2 3 4	- - - 16 Dokumen	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Penyusunan Dokumen RPHJ Pendek 16 KPH Tahun 2024	
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya luas pemanfaatan hutan	Persentase luas pemanfaatan Hutan	1	0	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Meningkatnya luas area pemanfaatan hutan	Persentase peningkatan luas area pemanfaatan hutan		5%			
								2	0	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 2 3 4	- - 0,50 0,50 Dokumen	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	1. Penyusunan Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi 2. Pelaksanaan Festival wisata Hutan	
								3	0								
								4	5%								
										Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi	1 2 3 4	- 0,50 0,25 0,25 Dokumen	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Penyusunan Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	√
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi	Lahan Kritis yang di rehabilitasi	1	0	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis yang direhabilitasi		962,77 ha			
								2	0	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 2 3 4	1,00 0,00 0,00 0,00 Dokumen	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Tahun 2023	
								3	0								
								4	963 ha								
										Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1 2 3 4	962,77 - - - Ha	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	Penghijauan lingkungan di KPH	

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN II
															19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21
										Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 2 3 4	0,25 0,25 - 0,5 laporan	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	1. Monev Kegiatan RHL di Kab Tanggamus 2. Monev Kegiatan RHL di Kab Pesisir Barat 3. Monev Kegiatan RHL di Kab Lampung Barat 4. Monev Kegiatan RHL di Kab Way Kanan	√
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Menurunnya kerusakan hutan	Luas kerusakan hutan	1	0	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Meningkatnya pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Persentase kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan		100%			
								2	0	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Hutan	Jumlah penanganan tindak pidana kehutanan di Provinsi Lampung	1 2 3 4	Kasus - Kasus - Kasus 1 Kasus	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	1. Patroli Pengamanan Hutan 2. Penyidikan TIPIHUT	√
								3	0								
								4	374.965 ha								
										Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah operasi/patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1 2 3 4	51 Operasi 51 Operasi 51 Operasi 51 Operasi	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan di 17 KPH berbasis SIPONTAN	√
										Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Terlaksananya Pengamanan Hasil Hutan	Jumlah operasi/patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	1 2 3 4	- operasi - operasi 3 operasi 2 operasi	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan di kawasan sekitar Pelabuhan Bakauheni	√
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 2 3 4	1 laporan - laporan - laporan 1 laporan	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan ke 17 KPH 2. Koordinasi Pelaksanaan Perlindungan Hutan ke ke KemenLHK	
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 2 3 4	- laporan - laporan - laporan 1,00 laporan	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	1. identifikasi/pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2. Ground check kebakaran hutan dan lahan	
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya produksi Hasil Hutan	Produksi Hasil Hutan	1	0	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Meningkatnya produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Persentase kenaikan produksi Hasil Hutan bukan Kayu		1,2%			
								2	0	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku dan Akses Pasar bagi PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 2 3 4	unit manajemen - unit manajemen - unit manajemen 2 unit manajemen	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Rekonsiliasi PNPB PSDH-DR sektor kehutanan	√
								3	0								
								4	1,2%								
										Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Terpenuhinya Hak Akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 2 3 4	- unit manajemen - unit manajemen - unit manajemen 2 unit manajemen	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Pembinaan kepada pelaku usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu	√

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN II
															19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21
										Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan kayu	Persentase meningkatnya produksi hasil hutan kayu		5%			
										Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Pembinaan IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun ke Kabupten Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pringsewu, Pesisir Barat, dan Lampung Timur	√
								2	Dokumen								
								3	1 Dokumen								
								4	1 Dokumen								
										Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu Skala dan Menengah Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1	2 Dokumen	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Fasilitasi kepengurusan IUIPHHK Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	√
								2	3 Dokumen								
								3	3 Dokumen								
								4	3 Dokumen								
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan	Persentase pembinaan dan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan	1	0	Perbenihan Tanaman Hutan	Meningkatnya jumlah Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan	Jumlah Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan		100%			
								2	0	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1	0 unit usaha	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	Survey/verifikasi ke Pengada dan Pengedar benih dan/atau bibit Tanaman Hutan Terdaftar	√
							3	0	2				1 unit usaha				
							4	100%	3				2 unit usaha				
									4				2 unit usaha				
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	1	-	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	Persentase Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan		5%			
								2	-	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1	50,00 orang	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan	1. Pelaksanaan Penilaian Lomba Wana Lestari, Pembinaan Penyuluh Kehutanan, PKSM, dan Penyusunan Program	√
							3	-	2				50,00 orang				
							4	5%	3				50,00 orang				

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN II
															19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21
													4	50,00 orang	Masyarakat dan	Penyuluhan Kehutanan	
										Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1	- kelompok	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan	1. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	√
												2	- kelompok				
												3	- kelompok				
												4	11 kelompok				
										Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Peretujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1	- ha	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	1. Pelaksanaan Bintekwasdal Izin Perhutanan sosial di KPH 2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pra dan paska izin Ps di KPH	√
												2	- ha				
												3	- ha				
												4	63.197 ha				
					PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Meningkatnya pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Persentase rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 provinsi	1	-	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kab/kota dalam daerah kab/kota dalam 1 daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Provinsi		25%			
								2	-	Penyusunan dan	Tersusunnya dan	Jumlah Dokumen Rencana	1	- Dokumen	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	1. Pengumpulan data biofisik, sosekbud, dan kelembagaan DAS Sekampung 2. Re-checking lapangan dalam rangka penyusunan RPDAS	√
							3	-	Penetapan Rencana	Ditetapkannya Rencana	Pengelolaan DAS yang	2	- Dokumen				
							4	25%	Pengelolaan DAS	Pengelolaan DAS	Ditetapkan	3	- Dokumen				
												4	1 Dokumen				
										Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1	- Orang	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	1. Pembinaan terhadap KTH/Kopmas terkait Penggelolaan DAS Terpadu	√
												2	30 Orang				
												3	- Orang				
												4	- Orang				
										Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1	- Dokumen	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	1. Pelaksanaan Koordinasi dan Monev Pengelolaan DAS Terpadu	√
												2	- Dokumen				
												3	- Dokumen				
												4	1 Dokumen				
2	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	1	-	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Meningkatnya luas areal yang telah dipulihkan	Luas areal yang telah dipulihkan	1	-	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Meningkatnya Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi		35 ha			
			2	-				2	-	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	1	- Laporan	KPHK TAHURA WAR	Operasi Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	
			3	-				3	-				2	- Laporan			
			4	0,05%				4	35 ha				3	3 Laporan			
													4	3 Laporan			
										Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengamanan KawasanTahura Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	1	- Operasi	KPHK TAHURA WAR	Operasi Pengamanan Kawasan Tahura pada setiap Resort	√
												2	6 Operasi				
												3	- Operasi				
												4	- Operasi				
										Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Jenis Tumbuhan, Satwa dan Habitatnya di Tahura Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	1	0,50 Ha	KPHK TAHURA WAR	1. Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat Penangkaran Rusa	√
												2	0,50 Ha				
												3	0,50 Ha				
												4	0,50 Ha				
										Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pemulihan Ekosistem Tahura Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	1	8,75 Ha	KPHK TAHURA WAR	1. Pembangunan/pemeliharaan Pusat Inkubasi Koleksi Tanaman Nusantara	√
												2	8,75 Ha				
												3	8,75 Ha				
												4	8,75 Ha				

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN II
															19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18			
										Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di Tahura	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindaklanjuti	1 2 3 4	- Permohonan 1 Permohonan 1 Permohonan 1 Permohonan	KPHK TAHURA WAR	1. Fasilitasi dan/atau Monitoring Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	√
										Keja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara Tahura Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	1 2 3 4	- Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen - Dokumen	KPHK TAHURA WAR	1. Fasilitasi dan/atau Monitoring Evaluasi Kerjasama Penyelenggaraan TAHURA	√
										Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	1 2 3 4	- Desa - Desa - Desa 10 Desa	KPHK TAHURA WAR	1. Penguatan Kapaitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA	√
										Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Tahura Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang	1 2 3 4	- Dokumen - Dokumen - Dokumen 2 Dokumen	KPHK TAHURA WAR	1. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura Jangka Panjang dan Jangka Pendek	√
					PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	meningkatnya perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar	Jumlah perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar	1	-	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar	persentase perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar		90%/ tahun			
								2	-	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 2 3 4	- Laporan 1 Laporan - Laporan - Laporan	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	1. Pembinaan tim satgas penanggulangan satwa liar 2. Identifikasi tegakan kayu sonokeling 3. Hibah perlengkapan tim satgas penanggulangan satwa liar	√
								3	-								
								4	2 jenis								
										Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase kegiatan pengelolaanKawasan bernilai ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola		90%/ tahun			
										Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	1 2 3 4	Orang 30 Orang Orang - Orang	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	√
										PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	25%			
										Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	(Jumlah rencana penyusunan dokumen perencanaan / realisasi penyusunan dokumen) X 100%		100%			
								2	25%	Penyusunan Dokumen	Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	6 Dokumen	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	√
								3	25%	Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	6 Dokumen			
								4	25%				3	6 Dokumen			
													4	6 Dokumen			

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN II
															19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18			
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 2 3 4	- Dokumen - Dokumen - Dokumen 2 Dokumen	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja OPD	
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah		100%			
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 2 3 4	481 orang/bulan 481 orang/bulan 481 orang/bulan 481 orang/bulan	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	1 2 3 4	- Laporan - Laporan - Laporan 1,00 Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	√
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	meningkatnya Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%			
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 2 3 4	- Laporan - Laporan 1,00 Laporan - Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		100%			
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 2 3 4	- Orang 75 Orang 75 Orang - Orang	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	√
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah		12 bulan			
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 2 3 4	4 paket 4 paket 4 paket 6 paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 2 3 4	4 paket 4 paket 4 paket 6 paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 2 3 4	2 paket 3 paket 3 paket 4 paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 2 3 4	4 paket 4 paket 4 paket 6 paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Bahan/Material untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 2 3 4	3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Fasilitasi Makan Minum Tamu/Rapat untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN II	
																	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 2 3 4	3 3 3 3	Laporan Laporan Laporan Laporan	SEKRETARIAT	1. Rakorenbanghut 2023 2. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 2 3 4	3 3 3 3	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	√
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik OPD	Persentase jumlah pengadaan barang milik daerah		100%				
										Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 2 3 4	- 1 - -	paket paket paket paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Mebel untuk OPD	√
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 2 3 4	3 - - -	Unit Unit Unit Unit	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk OPD	
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 2 3 4	- 1 - -	Unit Unit Unit Unit	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√
											Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 2 3 4	- 7 - -	Unit Unit Unit Unit	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan dinas kehutanan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dinas kehutanan		12 bulan				
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 2 3 4	3 3 3 3	Laporan Laporan Laporan Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 2 3 4	3 3 3 3	Laporan Laporan Laporan Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 2 3 4	3 3 3 3	Laporan Laporan Laporan Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penyediaan Jlaporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik dinas kehutanan	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik dinas kehutanan		12 bulan				
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 2 3 4	51 51 51 69	unit unit unit unit	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda Empat	√
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 2	27 51	unit unit	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Pajak Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda	√

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN II
															19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21
										Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipemimara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	51 unit	SEKRETARIAT	Empat	
												4	93 unit				
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	24 unit	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan perlengkapan kantor untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
												2	31 unit				
												3	12 unit				
												4	89 unit				
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	- unit	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
												2	1 unit				
												3	- unit				
												4	- unit				

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023
TRIWULAN III**

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)	1	-	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan	Persentase dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan	1	0	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Meningkatnya dokumen penataan hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH		100%			
			2	-				2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk	1 2 3 4	- - - 1,00 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	
			3	-				3	0								
			4	33,69				4	100%								
										Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Meningkatnya dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan	Persentase dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan		100%			
										Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 2 3 4	- - - 16 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Penyusunan Dokumen RPHJ Pendek 16 KPH Tahun 2024	
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya luas pemanfaatan hutan	Persentase luas Pemanfaatan Hutan	1	0	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Meningkatnya luas area pemanfaatan hutan	Persentase peningkatan luas area pemanfaatan hutan		5%			
								2	0	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 2 3 4	- - 0,50 0,50 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	1. Penyusunan Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi 2. Pelaksanaan Festival wisata Hutan	√
								3	0								
								4	5%								
										Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi	1 2 3 4	- 0,50 0,25 0,25 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Penyusunan Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	√
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi	Lahan Kritis yang di rehabilitasi	1	0	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis yang direhabilitasi		962,77 ha			
								2	0	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 2 3 4	1,00 0,00 0,00 0,00 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Tahun 2023	
								3	0								
								4	963 ha								
										Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1 2 3 4	962,77 - - - Ha Ha Ha Ha	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	Penghijauan lingkungan di KPH	

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21
										Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1	0,25 laporan	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	1. Monev Kegiatan RHL di Kab Tanggamus 2. Monev Kegiatan RHL di Kab Pesisir Barat 3. Monev Kegiatan RHL di Kab Lampung Barat 4. Monev Kegiatan RHL di Kab Way Kanan	
												2	0,25 laporan				
												3	- laporan				
												4	0,5 laporan				
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Menurunnya kerusakan hutan	Luas kerusakan hutan	1	0	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Meningkatnya pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Persentase kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan		100%			
										Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Hutan	Jumlah penanganan tindak pidana kehutanan di Provinsi Lampung	1	Kasus	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	1. Patroli Pengamanan Hutan 2. Penyidikan TIPIHUT	√
												2	- Kasus				
												3	- Kasus				
												4	1 Kasus				
										Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah operasi/patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1	51 Operasi	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan di 17 KPH berbasis SiPONTAN	√
												2	51 Operasi				
												3	51 Operasi				
												4	51 Operasi				
										Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Terlaksananya Pengamanan Hasil Hutan	Jumlah operasi/patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	1	- operasi	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan di kawasan sekitar Pelabuhan Bakauheni	√
												2	- operasi				
												3	3 operasi				
												4	2 operasi				
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1	1 laporan	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan ke 17 KPH 2. Koordinasi Pelaksanaan Perlindungan Hutan ke ke KemenLHK	
												2	- laporan				
												3	- laporan				
												4	1 laporan				
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1	- laporan	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	1. identifikasi/pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2. Ground check kebakaran hutan dan lahan	
												2	- laporan				
												3	- laporan				
												4	1,00 laporan				
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya produksi Hasil Hutan	Produksi Hasil Hutan	1	0	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Meningkatnya produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Persentase kenaikan produksi Hasil Hutan bukan Kayu		1,2%			
										Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku dan Akses Pasar bagi PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1	unit manajemen	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Rekonsiliasi PNPB PSDH-DR sektor kehutanan	√
												2	- unit manajemen				
												3	- unit manajemen				
												4	2 unit manajemen				
										Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Terpenuhinya Hak Akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1	- unit manajemen	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Pembinaan kepada pelaku usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu	√
												2	unit manajemen				
												3	- unit manajemen				
												4	2 unit manajemen				

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21
										Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan kayu	Persentase meningkatnya produksi hasil hutan kayu		5%			
										Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Pembinaan IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun ke Kabupaten Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pringsewu, Pesisir Barat, dan Lampung Timur	√
									2			Dokumen					
												3	1 Dokumen				
												4	1 Dokumen				
										Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu Skala dan Menengah Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1	2 Dokumen	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Fasilitasi kepengurusan IUIPHHK Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	√
												2	3 Dokumen				
												3	3 Dokumen				
												4	3 Dokumen				
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan	Persentase pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan	1	0	Perbenihan Tanaman Hutan	Meningkatnya jumlah Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan	Persentase Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan		100%			
								2	0	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1	0 unit usaha	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	Survey/verifikasi ke Pengada dan Pengedar benih dan/atau bibit Tanaman Hutan Terdaftar	√
							3	0				2	1 unit usaha				
							4	100%				3	2 unit usaha				
												4	2 unit usaha				
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	1	-	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	Persentase Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan		5%			
								2	-	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1	50,00 orang	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan	1. Pelaksanaan Penilaian Lomba Wana Lestari, Pembinaan Penyuluh Kehutanan, PKSM, dan Penyusunan Program	√
							3	-				2	50,00 orang				
							4	5%				3	50,00 orang				

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21
													4	50,00 orang	Masyarakat dan	Penyuluhan Kehutanan	
										Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Tertindaknya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1	- kelompok	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan	1. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	√
												2	- kelompok				
												3	- kelompok				
												4	11 kelompok				
										Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Tertindaknya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1	- ha	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan	1. Pelaksanaan Bintekwasdal Izin Perhutanan sosial di KPH	√
												2	- ha				
												3	- ha				
													4	63.197 ha	Usaha Kehutanan	2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pra dan paska izin Ps di KPH	√
					PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Meningkatnya pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Persentase rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 provinsi	1	-	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kab/kota dalam daerah kab/kota dalam 1 daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kab/kota dalam daerah kab/kota dalam 1 daerah Provinsi		25%			
								2	-	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Tersusunnya dan Ditetapkannya Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1	- Dokumen	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	1. Pengumpulan data biofisik, sosekbud, dan kelembagaan DAS Sekampung	√
							3	-									
							4	25%									
										Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Tertindaknya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1	- Orang	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	1. Pembinaan terhadap KTH/Kopmas terkait Pengelolaan DAS Terpadu	
												2	30 Orang				
												3	- Orang				
												4	- Orang				
										Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Tertindaknya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1	- Dokumen	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	1. Pelaksanaan Koordinasi dan Monev Penggelolaan DAS Terpadu	√
												2	- Dokumen				
												3	- Dokumen				
												4	1 Dokumen				
2	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	1	-	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Meningkatnya luas areal yang telah dipulihkan	Luas areal yang telah dipulihkan	1	-	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Meningkatnya Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi		35 ha			
			2	-				2	-	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Tertindaknya Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	1	- Laporan	KPHK TAHURA WAR	Operasi Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	√
			3	-			3	-									
			4	0,05%			4	35 ha									
										Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Tertindaknya Pengamanan KawasanTahura Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	1	- Operasi	KPHK TAHURA WAR	Operasi Pengamanan Kawasan Tahura pada setiap Resort	√
												2	6 Operasi				
												3	- Operasi				
												4	- Operasi				
										Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Tertindaknya Pengelolaan Jenis Tumbuhan, Satwa dan Habitatnya di Tahura Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	1	0,50 Ha	KPHK TAHURA WAR	1. Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat Penangkaran Rusa	√
												2	0,50 Ha				
												3	0,50 Ha				
												4	0,50 Ha				
										Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Tertindaknya Pemulihan Ekosistem Tahura Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	1	8,75 Ha	KPHK TAHURA WAR	1. Pembangunan/pemeliharaan Pusat Inkubasi Koleksi Tanaman Nusanantara	√
												2	8,75 Ha				
												3	8,75 Ha				
												4	8,75 Ha				

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21
										Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di Tahura	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindaklanjuti	1 2 3 4	- Permohonan 1 Permohonan 1 Permohonan 1 Permohonan	KPHK TAHURA WAR	1. Fasilitas dan/atau Monitoring Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	√
										Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara Tahura Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	1 2 3 4	- Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen - Dokumen	KPHK TAHURA WAR	1. Fasilitas dan/atau Monitoring Evaluasi Kerjasama Penyelenggaraan TAHURA	√
										Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	1 2 3 4	- Desa - Desa - Desa 10 Desa	KPHK TAHURA WAR	1. Penguatan Kapaitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA	√
										Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Tahura Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang	1 2 3 4	- Dokumen - Dokumen - Dokumen 2 Dokumen	KPHK TAHURA WAR	1. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura Jangka Panjang dan Jangka Pendek	√
					PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	meningkatnya perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar	Jumlah perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar	1	-	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar	persentase perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar		90%/ tahun			
								2	-	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 2 3 4	- Laporan 1 Laporan - Laporan - Laporan	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	1. Pembinaan tim satgas penanggulangan satwa liar 2. Identifikasi tegakan kayu sonokeling 3. Hibah perlengkapan tim satgas penanggulangan satwa liar	
								4	2 jenis								
										Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase kegiatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola		90%/ tahun			
										Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	1 2 3 4	Orang 30 Orang Orang - Orang	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	25%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	(Jumlah rencana penyusunan dokumen perencanaan / realisasi penyusunan dokumen) X 100%		100%			
								2	25%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 2 3 4	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	√

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN III	
															19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	-	Dokumen	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja OPD	
												2	-	Dokumen				
												3	-	Dokumen				
												4	2	Dokumen				
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah		100%				
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	481	orang/bulan	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√
												2	481	orang/bulan				
												3	481	orang/bulan				
												4	481	orang/bulan				
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	1	-	Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	√
												2	-	Laporan				
												3	-	Laporan				
												4	1,00	Laporan				
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	meningkatnya Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%				
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	-	Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	√
												2	-	Laporan				
												3	1,00	Laporan				
												4	-	Laporan				
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		100%				
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	-	Orang	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	√
												2	75	Orang				
												3	75	Orang				
												4	-	Orang				
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah		12	bulan			
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4	paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kehutanan dan KPH	√
												2	4	paket				
												3	4	paket				
												4	6	paket				
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	4	paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Kehutanan dan KPH	√
												2	4	paket				
												3	4	paket				
												4	6	paket				
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	2	paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Kehutanan dan KPH	√
												2	3	paket				
												3	3	paket				
												4	4	paket				
										Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	4	paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Bahan/Material untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
												2	4	paket				
												3	4	paket				
												4	6	paket				
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	3	Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Fasilitasi Makan Minum Tamu/Rapat untukDinas Kehutanan dan KPH	√
												2	3	Laporan				
												3	3	Laporan				
												4	3	Laporan				

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN III	
																		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 2 3 4	3 3 3 3	Laporan Laporan Laporan Laporan	SEKRETARIAT	1. Rakorenbanghut 2023 2. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 2 3 4	3 3 3 3	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	√
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik OPD	Persentase jumlah pengadaan barang milik daerah		100%				
										Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 2 3 4	- 1 - -	paket paket paket paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Mebel untuk OPD	
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 2 3 4	3 - - -	Unit Unit Unit Unit	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk OPD	
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 2 3 4	- 1 - -	Unit Unit Unit Unit	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
											Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 2 3 4	- 7 - -	Unit Unit Unit Unit	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan dinas kehutanan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dinas kehutanan		12	bulan			
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 2 3 4	3 3 3 3	Laporan Laporan Laporan Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 2 3 4	3 3 3 3	Laporan Laporan Laporan Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 2 3 4	3 3 3 3	Laporan Laporan Laporan Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penyediaan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik dinas kehutanan	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik dinas kehutanan		12	bulan			
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 2 3 4	51 51 51 69	unit unit unit unit	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda Empat	√

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN III	
															19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	27	unit	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Pajak Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda Empat	√
												2	51	unit				
												3	51	unit				
												4	93	unit				
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertindakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	24	unit	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan perlengkapan kantor untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
												2	31	unit				
												3	12	unit				
												4	89	unit				
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	-	unit	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung untuk Dinas Kehutanan dan KPH	
												2	1	unit				
												3	-	unit				
												4	-	unit				

**RENCANA AKSI PENCAPIAN KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023
TRIWULAN IV**

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN IV
																	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)	1	-	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan	Persentase dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan	1	0	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Meningkatnya dokumen penataan hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH	17	100%			
			2	-				2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk	1	-	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	√
			3	-				3	0				2	-			
			4	33,69				4	100%				3	-			
										Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Meningkatnya dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan	Persentase dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan	4	1,00			
										Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	-	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Penyusunan Dokumen RPHJ Pendek 16 KPH Tahun 2024	√
													2	-			
													3	-			
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya luas pemanfaatan hutan	Persentase luas Pemanfaatan Hutan	1	0	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Meningkatnya luas area pemanfaatan hutan	Persentase peningkatan luas area pemanfaatan hutan	4	16			
													4	5%			
								2	0	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	-	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	1. Penyusunan Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi 2. Pelaksanaan Festival wisata Hutan	√
								3	0				2	-			
								4	5%				3	0,50			
													4	0,50			
										Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi	1	-	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Penyusunan Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	√
													2	0,50			
													3	0,25			
													4	0,25			
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi	Lahan Kririts yang di rehabilitasi	1	0	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	17	962,77 ha			
								2	0	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1,00	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Tahun 2023	
								3	0				2	0,00			
								4	963 ha				3	0,00			
													4	0,00			
										Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1	962,77	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	Penghijauan lingkungan di KPH	
													2	-			
													3	-			
													4	-			

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN IV
															19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21
										Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1	0,25 laporan	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	1. Monev Kegiatan RHL di Kab Tanggamus 2. Monev Kegiatan RHL di Kab Pesisir Barat 3. Monev Kegiatan RHL di Kab Lampung Barat 4. Monev Kegiatan RHL di Kab Way Kanan	√
												2	0,25 laporan				
												3	- laporan				
												4	0,5 laporan				
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Menurunnya kerusakan hutan	Luas kerusakan hutan		1	0	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Meningkatnya pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan		100%			
									2	0	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Hutan	Jumlah penanganan tindak pidana kehutanan di Provinsi Lampung	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	1. Patroli Pengamanan Hutan 2. Penyidikan TIPIHUT	√	
								3	0								
								4	374.965 ha								
										Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah operasi/patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1	51 Operasi	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan di 17 KPH berbasis SIPONTAN	√
												2	51 Operasi				
												3	51 Operasi				
												4	51 Operasi				
										Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Terlaksananya Pengamanan Hasil Hutan	Jumlah operasi/patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	1	- operasi	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan di kawasan sekitar Pelabuhan Bakauheni	√
												2	- operasi				
												3	3 operasi				
												4	2 operasi				
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1	1 laporan	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan ke 17 KPH 2. Koordinasi Pelaksanaan Perlindungan Hutan ke ke KemenLHK	√
												2	- laporan				
												3	- laporan				
												4	1 laporan				
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1	- laporan	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	1. identifikasi/pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2. Ground check kebakaran hutan dan lahan	√
												2	- laporan				
												3	- laporan				
												4	1,00 laporan				
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya produksi Hasil Hutan	Produksi Hasil Hutan		1	0	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Meningkatnya produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Persentase kenaikan produksi Hasil Hutan bukan Kayu		1,2%		
									2	0	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku dan Akses Pasar bagi PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Rekonsiliasi PNBPD PSDH-DR sektor kehutanan	√	
								3	0								
								4	1,2%								
										Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Terpenuhinya Hak Akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1	- unit manajemen	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Pembinaan kepada pelaku usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu	√
												2	- unit manajemen				
												3	- unit manajemen				
												4	2 unit manajemen				

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN IV
															19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21
										Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan kayu	Persentase meningkatnya produksi hasil hutan kayu		5%			
										Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Pembinaan IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun ke Kabupaten Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pringsewu, Pesisir Barat, dan Lampung Timur	√
								2	Dokumen								
								3	1 Dokumen								
								4	1 Dokumen								
										Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu Skala dan Menengah Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1	2 Dokumen	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Fasilitasi kepengurusan IUIPHHK Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	√
								2	3 Dokumen								
								3	3 Dokumen								
								4	3 Dokumen								
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan	Persentase pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan	1	0	Perbenihan Tanaman Hutan	Meningkatnya jumlah Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan	Jumlah Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan		100%			
								2	0	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1	0 unit usaha	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	Survey/verifikasi ke Pengada dan Pengedar benih dan/atau bibit Tanaman Hutan Terdaftar	√
							3	0	2				1 unit usaha				
							4	100%	3				2 unit usaha				
									4				2 unit usaha				
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	1	-	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	Persentase Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan		5%			
								2	-	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1	50,00 orang	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan	1. Pelaksanaan Penilaian Lomba Wana Lestari, Pembinaan Penyuluh Kehutanan, PKSM, dan Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan	√
							3	-	2				50,00 orang				
							4	5%	3				50,00 orang				
									4				50,00 orang				

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN		
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN IV		
															19			20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21		
										Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 2 3 4	- - - 11	kelompok kelompok kelompok kelompok	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan	1. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	√	
										Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1 2 3 4	- - - 63.197	ha ha ha ha	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	1. Pelaksanaan Bintekwasdal Izin Perhutanan sosial di KPH 2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pra dan paska izin Ps di KPH	√ √	
					PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Meningkatnya pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Persentase rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 provinsi	1	-	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kab/kota dalam daerah kab/kota dalam 1 daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Provinsi		25%					
								2	-	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Tersusunnya dan Ditetapkannya Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 2 3 4	- - - 1	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	1. Pengumpulan data biofisik, sosekbud, dan kelembagaan DAS Sekampung 2. Re-checking lapangan dalam rangka penyusunan RPDAS	√	
								3	-										
								4	25%										
										Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1 2 3 4	- 30 - -	Orang Orang Orang Orang	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	1. Pembinaan terhadap KTH/Kopmas terkait Pengelolaan DAS Terpadu		
										Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1 2 3 4	- - - 1	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	1. Pelaksanaan Koordinasi dan Movev Pengelolaan DAS Terpadu	√	
2	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	1	-	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Meningkatnya luas areal yang telah dipulihkan	Luas areal yang telah dipulihkan	1	-	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Meningkatnya Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi		35 ha					
			2	-				2	-	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	1 2 3 4	- - 3 3	Laporan Laporan Laporan Laporan	KPHK TAHURA WAR	Operasi Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	√	
			3	-				3	-										
			4	0,05%				4	35 ha										
										Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	1 2 3 4	- 6 - -	Operasi Operasi Operasi Operasi	KPHK TAHURA WAR	Operasi Pengamanan Kawasan Tahura pada setiap Resort	√	
										Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Jenis Tumbuhan, Satwa dan Habitatnya di Tahura Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	1 2 3 4	0,50 0,50 0,50 0,50	Ha Ha Ha Ha	KPHK TAHURA WAR	1. Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat Penangkaran Rusa	√	
										Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pemulihan Ekosistem Tahura Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	1 2 3 4	8,75 8,75 8,75 8,75	Ha Ha Ha Ha	KPHK TAHURA WAR	1. Pembangunan/pemeliharaan Pusat Inkubasi Koleksi Tanaman Nusantara	√	

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN IV
															19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21
										Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di Tahura	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindaklanjuti	1 2 3 4	- 1 1 1 Permohonan	KPHK TAHURA WAR	1. Fasilitas dan/atau Monitoring Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	√
										Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara Tahura Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	1 2 3 4	- 2 3 - Dokumen	KPHK TAHURA WAR	1. Fasilitas dan/atau Monitoring Evaluasi Kerjasama Penyelenggaraan TAHURA	
										Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	1 2 3 4	- - - 10 Desa	KPHK TAHURA WAR	1. Penguatan Kapaitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA	√
										Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Tahura Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang	1 2 3 4	- - - 2 Dokumen	KPHK TAHURA WAR	1. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura Jangka Panjang dan Jangka Pendek	√
					PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	meningkatnya perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar	Jumlah perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar	1	-	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar	persentase perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar		90%/ tahun			
								2	-	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 2 3 4	- 1 - - Laporan	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	1. Pembinaan tim satgas penanggulangan satwa liar 2. Identifikasi tegakan kayu sonokeling 3. Hibah perlengkapan tim satgas penanggulangan satwa liar	
								4	2 jenis								
										Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase kegiatan pengelolaanKawasan bernilai ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola		90%/ tahun			
										Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	1 2 3 4	Orang 30 Orang - Orang	Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	25%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	(Jumlah rencana penyusunan dokumen perencanaan / realisasi penyusunan dokumen) X 100%		100%			
								2	25%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 2 3 4	6 6 6 6 Dokumen	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	√

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN IV	
															19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 2 3 4	- - - 2	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja OPD	√
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah		100%				
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 2 3 4	481 481 481 481	orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	1 2 3 4	- - - 1,00	Laporan Laporan Laporan Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	√
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	meningkatnya Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%				
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 2 3 4	- - 1,00 -	Laporan Laporan Laporan Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		100%				
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 2 3 4	- 75 75 -	Orang Orang Orang Orang	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah		12 bulan				
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 2 3 4	4 4 4 6	paket paket paket paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 2 3 4	4 4 4 6	paket paket paket paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 2 3 4	2 3 3 4	paket paket paket paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 2 3 4	4 4 4 6	paket paket paket paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Bahan/Material untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 2 3 4	3 3 3 3	Laporan Laporan Laporan Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Fasilitasi Makan Minum Tamu/Rapat untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/ TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN IV	
															19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 2 3 4	3 3 3 3	Laporan Laporan Laporan Laporan	SEKRETARIAT	1. Rakorenbanghut 2023 2. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 2 3 4	3 3 3 3	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	√
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik OPD	Persentase jumlah pengadaan barang milik daerah		100%				
										Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 2 3 4	- 1 - -	paket paket paket paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Mebel untuk OPD	
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 2 3 4	3 - - -	Unit Unit Unit Unit	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk OPD	
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 2 3 4	- 1 - -	Unit Unit Unit Unit	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
											Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 2 3 4	- 7 - -	Unit Unit Unit Unit	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan dinas kehutanan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dinas kehutanan		12 bulan				
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 2 3 4	3 3 3 3	Laporan Laporan Laporan Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 2 3 4	3 3 3 3	Laporan Laporan Laporan Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 2 3 4	3 3 3 3	Laporan Laporan Laporan Laporan	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penyediaan Jlaporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik dinas kehutanan	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik dinas kehutanan		12 bulan				
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 2 3 4	51 51 51 69	unit unit unit unit	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda Empat	√

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET/TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/TW	PENANGGUNGJAWAB	AKSI KEGIATAN	TRIWULAN IV	
															19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 2 3 4	27 51 51 93	unit unit unit unit	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Pajak Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda Empat	√
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 2 3 4	24 31 12 89	unit unit unit unit	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan perlengkapan kantor untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 2 3 4	- 1 - -	unit unit unit unit	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung untuk Dinas Kehutanan dan KPH	